

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1. Pengungkapan dalam Laporan Tahunan

Informasi mengenai data keuangan perusahaan merupakan salah satu informasi penting bagi pengambil keputusan. Informasi tersebut bisa diperoleh dari laporan keuangan yang telah diaudit. Audit atas laporan keuangan dilakukan untuk menambah keyakinan bahwa pihak luar yang independen telah menilai bahwa laporan keuangan yang disusun oleh manajemen perusahaan telah sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.

Semakin banyak informasi yang diungkapkan menyebabkan laporan tahunan semakin informatif dan bermanfaat, namun akan diikuti dengan biaya penyajian informasi yang semakin tinggi. Biaya untuk mengungkapkan informasi menurut Foster (1986, dalam Meek, Roberts dan Gray, 1995) cenderung mahal, yang terdiri dari biaya pengumpulan dan pengolahan informasi, biaya litigasi, dan *proprietary costs* (*competitive disadvantage* dan *political cost*). Oleh karena itu pihak manajemen perusahaan perlu melihat manfaat dan biaya yang diperoleh atas pengungkapan laporan tersebut.

Jensen dan Meckling (1976) menggambarkan perusahaan sebagai sekumpulan kontrak kerja sama antara pihak-pihak yang berinteraksi di dalam perusahaan (*nexus of contract*). Masing-masing pihak akan bertindak sesuai dengan kepentingannya sendiri-sendiri sehingga akan muncul kepentingan yang

saling berlawanan. Masalah keagenan akan muncul antara *principal* sebagai pemilik perusahaan yang menanamkan modal ke dalam perusahaan, dengan *agent* (manajemen) yang diberi wewenang untuk mengelola modal tersebut.

Dalam perkembangannya masalah keagenan ini menjadi salah satu unsur penting dalam *corporate governance* (Arifin, 2005). Pentingnya hubungan agensi sebagai salah satu unsur *corporate governance* nampak pada prinsip-prinsipnya, yaitu:

1. Adanya hak-hak pemegang saham harus diberi informasi yang benar dan tepat waktu, ikut berperan serta dalam pengambilan keputusan mengenai perubahan-perubahan yang mendasar, dan turut memperoleh bagian keuntungan,
2. Adanya perlakuan sama terhadap para pemegang saham terutama pemegang saham minoritas dan asing, dengan keterbukaan (*transparency*) informasi penting, melarang pembagian untuk pihak sendiri, dan melarang perdagangan saham oleh orang dalam (*insider trading*),
3. Diakuinya peran pemegang saham, bersama pemegang kepentingan yang lain, dalam menciptakan kekayaan, lapangan kerja, dan perusahaan yang sehat,
4. Adanya pengungkapan (*disclosure*) yang akurat dan tepat pada waktunya serta transparansi atas hal penting bagi kinerja perusahaan, serta pemegang kepentingan, dan
5. Adanya tanggung jawab pengurus dalam manajemen, pengawasan manajemen, serta pertanggungjawaban kepada perusahaan dan para pemegang saham.

Hasil survey yang dilakukan tim Mckinsey, Coombes dan Watson (2000) dalam Djatmiko (2001), memperlihatkan bahwa *investor* bersedia memberikan premium kepada perusahaan dengan *corporate governance* yang bagus.

Salah satu wujud dari prinsip *corporate governance*, khususnya transparansi, adalah dikeluarkannya laporan keuangan secara rutin oleh perusahaan. Dalam PSAK No.1 dinyatakan bahwa laporan keuangan harus menyajikan informasi yang berguna untuk investor dan calon investor, kreditur, dan pemakai lainnya dalam pengambilan keputusan investasi, kredit, dan keputusan lain yang sejenis yang rasional. Informasi tersebut harus dapat dipahami oleh mereka yang mempunyai wawasan bisnis dan ekonomi. Laporan keuangan merupakan bentuk pertanggungjawaban manajemen (*stewardship*) atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya.

Laporan keuangan saja tidak cukup memadai bagi para *stakeholders* untuk pengambilan keputusan. Untuk itu Bapepam mewajibkan setiap emiten atau perusahaan publik untuk menyampaikan laporan tahunan sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban manajemen kepada *stakeholders*, yang terdiri dari informasi keuangan maupun non keuangan. Informasi yang diungkapkan dalam laporan tahunan bisa berisi informasi wajib (*mandatory disclosure*) sesuai dengan ketentuan Bapepam, maupun informasi sukarela (*voluntary disclosure*).

Mardiyah (2001) menyebut informasi wajib sebagai *protective disclosure* karena merupakan usaha badan pengawas pasar modal untuk melindungi investor dari perlakuan yang tidak wajar dari para emiten. Informasi sukarela disebut juga *informative disclosure* yaitu pengungkapan yang disajikan dalam rangka keterbukaan emiten untuk tujuan analisis investasi.

Menurut ketentuan Bapepam VIII.G.2 yang disahkan dalam kep-38/PM/1996, laporan tahunan perusahaan yang telah melakukan penawaran umum dan perusahaan publik, wajib memuat :

1. Laporan manajemen

Laporan ini terdiri dari dua bagian, yaitu penjelasan umum dan penjelasan khusus. Perusahaan bebas memberikan penjelasan umum mengenai perusahaan, selama tidak menyesatkan dan bertentangan dengan informasi yang disajikan dalam bagian lainnya. Penjelasan ini antara lain dapat memuat :

- Sambutan komisaris dan direksi,
- Uraian mengenai keikutsertaan perusahaan dalam kegiatan pelayanan masyarakat,
- Uraian mengenai program perusahaan dalam rangka pengembangan sumber daya manusia,
- Informasi mengenai perkembangan perusahaan, uraian tentang aspek pemasaran atas produk dan jasa perusahaan,
- Riwayat hidup para anggota komisaris dan / atau direksi, serta informasi lain yang bersifat umum yang berkaitan dengan hal-hal yang ingin dicapai di masa depan.

Penjelasan khusus mencakup hal-hal mengenai lokasi dan jenis dari aktiva tetap, informasi saham, kebijakan deviden, realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum, serta informasi material lainnya

2. Ikhtisar Data Keuangan Penting

Berisi penyajian informasi perbandingan selama 5 (lima) tahun buku tentang:

- Komponen laporan laba rugi, yaitu pendapatan, laba, jumlah saham yang beredar, laba (rugi) per saham,
- Laporan proforma tentang pendapatan atau penjualan, laba bersih, dan laba (rugi) per saham (jika diperlukan),
- Posisi keuangan seperti modal kerja bersih, jumlah aktiva, jumlah investasi, jumlah kewajiban, jumlah ekuitas,
- Rasio-rasio keuangan yang penting, antara lain rasio laba terhadap jumlah aktiva, rasio laba terhadap ekuitas, rasio lancar, rasio kewajiban terhadap ekuitas, rasio kewajiban terhadap jumlah aktiva, rasio kredit yang diberikan terhadap jumlah simpanan, rasio kecukupan modal, dan informasi keuangan perbandingan lainnya.

3. Analisis dan pembahasan umum oleh manajemen

Dalam bagian ini perusahaan harus memberikan uraian singkat yang membahas dan menganalisis laporan keuangan dan informasi lain dengan penekanan pada perubahan-perubahan material yang terjadi sejak laporan tahunan terakhir atau sejak pernyataan pendaftaran diajukan. Sebagai contoh bahasan dan analisis tentang uraian tentang kegiatan usaha, ikatan material, hasil usaha atau keadaan keuangan perusahaan pada masa yang akan datang, kejadian luar biasa, perubahan harga, resiko usaha, prospek perusahaan, dan sebagainya.

4. Laporan keuangan yang telah diaudit

Bagian ini wajib memuat laporan keuangan yang disusun sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia dan peraturan Bapepam di bidang akuntansi, serta harus diaudit oleh akuntan yang terdaftar di Bapepam. Laporan keuangan disajikan untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terakhir, meliputi neraca, laporan laba rugi, laporan saldo laba, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan.

Selain peraturan mengenai laporan tahunan, Bapepam dalam SE-02/PM/2002 telah menguraikan pedoman penyajian laporan keuangan yang mengacu pada Standar Akuntansi Keuangan (SAK). Ketentuan ini harus digunakan oleh emiten atau perusahaan publik dalam menyampaikan laporan keuangan sebagai bagian dari laporan tahunan kepada Bapepam dan masyarakat luas.

Beberapa emiten atau perusahaan publik kadang juga mengungkapkan informasi di luar dari yang diwajibkan ketentuan Bapepam. Pengungkapan informasi melebihi dari yang diwajibkan inilah yang disebut sebagai informasi sukarela (*voluntary disclosure*). Beberapa penelitian yang pernah dilakukan menemukan bahwa tingkat pengungkapan informasi perusahaan-perusahaan di Indonesia dalam laporan tahunan masih rendah (Suripto, 1999; Gunawan, 2000; Mardiyah, 2001; Fitriany, 2001; Marwata, 2001; Murni, 2003; Welly, 2006; Supatmi, 2006). Dengan berbagai indikator tentang tingkat pengungkapan informasi yang digunakan, diketahui bahwa secara umum perusahaan publik di Indonesia hanya mengungkapkan informasi yang bersifat *mandatory*. Bahkan untuk informasi wajib ini masih ada beberapa item yang tidak diungkapkan.

Rendahnya tingkat pengungkapan laporan keuangan tahunan karena kurangnya penegakan atas pelaksanaan ketentuan ini oleh regulator, dan belum maksimalnya peran dewan komisaris sebagai pihak yang melindungi kepentingan *minority shareholders*, menurut Utama (2003).

2.2. Biaya Modal

Pengertian biaya modal sendiri adalah biaya riil yang harus dikeluarkan oleh perusahaan untuk memperoleh dana baik yang berasal dari hutang, saham preferen, saham biasa, maupun laba ditahan untuk mendanai suatu investasi atau operasi perusahaan. Penentuan besarnya biaya modal dimaksudkan untuk mengetahui berapa besarnya biaya riil yang harus dikeluarkan perusahaan untuk memperoleh dana yang diperlukan. Menurut (Modigliani dan Miller, 1959 dalam Mardiyah, 2001). Biaya modal (*cost of capital*) merupakan biaya yang dikeluarkan untuk membiayai sumber pembelanjaan (*source of financing*) Biaya modal dapat dihitung berdasarkan biaya untuk masing-masing sumber dana atau disebut biaya modal individual. Biaya modal individual dihitung tiap jenis modal. Namun apabila perusahaan menggunakan beberapa sumber modal maka biaya modal yang dihitung adalah biaya modal rata-rata tertimbang (*Weighted average cost of capital/WACC*) dari seluruh modal yang digunakan.

Pengungkapan informasi biaya modal yang dilakukan oleh perusahaan dapat membantu para investor untuk memperkirakan waktu dan ketidakpastian arus kas di masa sekarang maupun yang akan datang sehingga mereka dapat menentukan nilai perusahaan dan membuat keputusan investasi seperti pemilihan portofolio surat berharga.

Sengupta (1998) membuktikan bahwa perusahaan dengan tingkat pengungkapan yang berkualitas tinggi memiliki *yield to maturity* maupun tingkat bunga efektif hutang yang lebih rendah. Sementara itu, Klein dan Bawa (1976), Handa dan Lin (1993), Coles et al. (1995) dan Clarkson et al. (1996) dalam Botosan (1997) menemukan bahwa semakin besar tingkat pengungkapan informasi akan mengurangi *cost of equity capital* melalui penurunan resiko yang tidak dapat didiversifikasi (*non diversifiable risk*).

Amihud dan Mendelson (1986), Diamond dan Verrechia (1991) dalam Botosan (1997) menemukan bahwa dengan mengungkapkan informasi privat maka tuntutan investor terhadap kompensasi menurun karena biaya transaksi turun sehingga komponen *adverse selection* dari *bid-ask spread* berkurang dan pada akhirnya *cost of equity capital* juga turun.

Botosan (1997) menggunakan 35 item *disclosure* yang disusunnya, juga menemukan adanya hubungan negatif antara tingkat pengungkapan terhadap *cost of equity capital*. Dengan menggunakan variabel kontrol ukuran perusahaan, *beta market*, dan jumlah analisis perusahaan, dapat ditarik kesimpulan bahwa perusahaan dengan *low analyst following* memiliki *cost of equity capital* lebih rendah dibandingkan dengan perusahaan dengan *high analyst following*.

Chen, Chen dan Wei (2003) yang melakukan penelitian pengaruh pengungkapan, *corporate governance* dan *cost of equity capital* di negara-negara Asia, menemukan bahwa mekanisme *corporate governance*, baik yang diungkapkan atau tidak, secara signifikan berpengaruh negatif terhadap *cost of equity capital*. Penelitian ini menggunakan variabel kontrol *beta market* dan

ukuran perusahaan dengan menggunakan sample 275 perusahaan di 9 negara Asia, diantaranya Indonesia. Mereka membuktikan bahwa perlindungan terhadap investor di setiap negara dan tingkat *corporate governance* di perusahaan merupakan faktor penting dalam mengurangi *cost of equity capital*.

Lambert, Leuz dan Verrecchia (2005) membuktikan bahwa kualitas pengungkapan informasi akuntansi dapat mempengaruhi *cost of equity capital*, baik secara langsung yakni yang disebabkan pengungkapan yang berkualitas tinggi akan mengurangi *covariance* dari arus kas perusahaan maupun secara tidak langsung yang disebabkan oleh pengungkapan yang berkualitas tinggi yang akan mempengaruhi keputusan riil perusahaan, yang dapat merubah rasio arus kas yang diharapkan terhadap *covariance* dari arus kas ini dengan total semua arus kas di pasar.

Francis, Nanda dan Olsson (2005) menguji hubungan antara pengungkapan sukarela, kualitas informasi, dan *cost of capital*. Penelitian tersebut dapat melihat hubungan positif antara kualitas informasi akrual sebagai proksi arus kas perusahaan, dengan tingkat pengungkapan sukarela. Hasil penelitian juga menunjukkan semakin luas pengungkapan sukarela maka *cost of equity* juga akan semakin rendah.

Dengan menggunakan sampel perusahaan perusahaan yang *listing* di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 1996, yakni Komalasari (2000) yang menemukan bahwa ada hubungan negatif antara tingkat pengungkapan informasi dengan *cost of equity capital*. Hasil pengujian juga menunjukkan hubungan negatif antara ukuran perusahaan dengan *cost of equity capital*.

Mardiyah (2001), dengan menggunakan tahun data yang sama seperti Komalasari (2000) juga menemukan ada pengaruh positif antara informasi asimetri dengan *cost of capital*. Dengan menggunakan indeks pengungkapan sebanyak 18 item, hasil pengujian membuktikan bahwa semakin tinggi tingkat *disclosure* maka informasi *asimetris* akan semakin rendah. Dapat disimpulkan bahwa ukuran perusahaan diketahui memiliki hubungan positif dengan tingkat pengungkapan.

Hasil temuan Murni (2003) yang menggunakan data laporan tahunan perusahaan yang terdaftar di BEI tahun 1999 dan 2000 mendukung kedua penelitian sebelumnya. Dengan menggunakan indikator pengungkapan yang dikembangkannya sendiri, ia menemukan bahwa ada pengaruh luas pengungkapan sukarela terhadap *cost of equity capital*.

Hasil temuan di atas tidak konsisten dengan apa yang ditemukan Gulo (2000) yang *menguji* efek luas pengungkapan sukarela yang disampaikan oleh manajemen dalam laporan tahunan terhadap *cost of equity capital*. Dengan menggunakan sample 58 perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI sejak tahun 1990 hingga tahun 1995, hasil pengujian empiris menunjukkan bahwa variabel indeks ungkapan sukarela secara statistik tidak mempunyai pengaruh yang negatif signifikan terhadap *cost of equity capital*.

2.3. Ukuran perusahaan

Secara umum, perusahaan besar akan mengungkapkan informasi lebih banyak daripada perusahaan kecil. Banyak penelitian-penelitian empiris yang berkaitan dengan ungkapan laporan keuangan sering dihubungkan dengan ukuran perusahaan secara statistik signifikan. Lang dan Lundholm (1993, dalam Marwata 2000) menyatakan bahwa perusahaan yang berukuran lebih besar, cenderung memiliki *public demand* akan informasi lebih tinggi jika dibanding dengan perusahaan yang lebih kecil. Hal tersebut juga sangat erat kaitannya dengan teori keagenan. Dalam teori keagenan (*agency theory*), hubungan agensi muncul ketika satu orang atau lebih (*principal*) mempekerjakan orang lain (*agent*) untuk memberikan suatu jasa dan kemudian mendelegasikan wewenang pengambilan keputusan kepada *agent* tersebut. Hubungan antara *principal* dan *agent* dapat mengarah pada kondisi ketidakseimbangan informasi (*asymmetrical information*) karena *agent* berada pada posisi yang memiliki informasi yang lebih banyak tentang perusahaan dibandingkan dengan *principal*. Dengan asumsi bahwa individu-individu bertindak untuk memaksimalkan kepentingan diri sendiri, maka dengan informasi asimetri yang dimilikinya akan mendorong *agent* untuk menyembunyikan beberapa informasi yang tidak diketahui *principal*. Dalam kondisi yang asimetri tersebut, *agent* dapat mempengaruhi angka-angka akuntansi yang disajikan dalam laporan keuangan dengan cara melakukan manajemen laba.

Sehubungan dengan teori tersebut perusahaan besar akan mengungkapkan informasi lebih banyak sebagai upaya untuk mengurangi biaya keagenan (Jensen dan Meckling, 1976). Perluasan pengungkapan ini pada

akhirnya akan menurunkan *cost of equity capital*. Di sisi lain, perusahaan besar menghadapi *political cost* lebih besar dan banyak disorot oleh publik dibandingkan perusahaan kecil sehingga pada akhirnya juga bisa mempengaruhi biaya modal perusahaan.

Perusahaan kecil umumnya berada pada tingkat persaingan yang ketat jika melakukan pengungkapan terhadap informasi yang terlalu banyak kepada pihak eksternal dapat membahayakan posisinya dalam persaingan, sehingga perusahaan kecil cenderung untuk tidak melakukan pengungkapan selengkap perusahaan besar (Singhvi dan Desai, 1971; Buzby, 1975, dalam Marwata, 2000). Dengan demikian, semakin besar ukuran perusahaan akan semakin tinggi tingkat *disclosure* yang pada akhirnya bisa membuat *cost of equity capital* semakin rendah.

Dari berbagai penelitian, diketahui variabel ukuran perusahaan merupakan variabel yang secara umum konsisten sebagai variabel kontrol yang mempengaruhi hubungan tingkat pengungkapan dan *cost of equity capital* (Meek, Roberts dan Gray, 1995; Botosan, 1997; Suropto, 1999; Mardiyah, 2001; Fitriany, 2001). Mardiyah (2001) menemukan bahwa ukuran perusahaan sebagai variabel moderasi dalam hubungan antara asimetri informasi dengan *cost of equity capital*.

Gulo (2000) dalam penelitiannya menemukan ukuran perusahaan yang diukur dengan nilai pasar ekuitas perusahaan secara statistik tidak mempunyai pengaruh negatif yang signifikan terhadap *cost of equity capital*. Penelitian yang dilakukan Murni (2003) menemukan bahwa ada pengaruh negatif ukuran perusahaan terhadap *cost of equity capital*-nya, tetapi tidak menemukan bahwa

ukuran perusahaan secara signifikan mempengaruhi hubungan antara tingkat pengungkapan sukarela maupun asimetris informasi dengan *cost of equity capital*.

2.4. Kualitas Audit

Menurut AAA *Financial Accounting Standard Committee 2000* menjelaskan bahwa Kualitas Audit ditentukan oleh dua hal yaitu kompetensi dan Independensi. Kompetensi berkaitan dengan pendidikan dan pengalaman memadai yang dimiliki akuntan publik dalam bidang auditing dan akuntansi. Sedangkan independensi merupakan salah satu komponen etika yang harus dijaga oleh akuntan publik. Independen berarti akuntan publik tidak mudah dipengaruhi, karena ia melaksanakan pekerjaan untuk kepentingan umum.

Reputasi Auditor sering digunakan sebagai ukuran dari kualitas audit, namun demikian banyak penelitian kompetensi dan independensi masih jarang digunakan untuk melihat seberapa besar kualitas audit secara aktual (Ruiz Barbadillo, 2004). Pada umumnya reputasi auditor didasari kepada kepercayaan pemakai jasa auditor bahwa auditor memiliki kekuatan monitoring yang secara umum tidak dapat diamati.

Kualitas audit juga dapat dilihat dari opini audit karena opini audit merupakan bagian penting informasi yang disampaikan oleh auditor ketika mengaudit laporan keuangan suatu perusahaan yang menitikberatkan kesesuaian antara laporan keuangan dengan standard akuntansi yang diterima umum.

Sejalan dengan Pernyataan Standar Auditing No.02 dalam Standar Auditing Seksi 110 yang menyatakan bahwa auditor bertanggung jawab untuk merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan yang memadai tentang apakah laporan keuangan bebas dari salah saji material, baik yang disebabkan oleh kekeliruan atau kecurangan.

Sandra dan Kusuma (2004) menyatakan bahwa laporan keuangan yang telah diaudit yang berkualitas, relevan, dan dapat dipercaya dihasilkan dari audit yang dilakukan secara efektif oleh auditor yang berkualitas. Pemakai laporan keuangan akan lebih percaya pada laporan keuangan yang diaudit oleh auditor yang dianggap berkualitas tinggi dibanding dengan auditor yang kurang berkualitas. Auditor berkualitas akan melakukan audit yang berkualitas pula (kredibilitas laporan keuangan meningkat).

Salah satu ukuran kualitas auditor adalah besarnya kantor akuntan publik (KAP). De Angelo (1981, dalam Gunther dan Moore, 2002) menyatakan bahwa KAP besar memiliki kualitas audit lebih tinggi dibanding KAP kecil. KAP besar rata-rata memiliki klien lebih banyak dan klien yang cenderung berukuran lebih besar dibandingkan dengan KAP kecil. Hal ini menjadi *bargaining power* bagi KAP jika ada klien yang mengancam untuk tidak lagi memakai jasa KAP tersebut karena auditor tidak menuruti keinginan klien. Sebagai hasilnya investor akan memilih berinvestasi pada perusahaan yang diaudit oleh KAP besar. De Angelo juga menyatakan bahwa KAP besar memiliki keahlian *teknikal relative* lebih tinggi dalam wilayah audit yang terkait dengan perusahaan-perusahaan yang sahamnya dimiliki publik.

Teoh dan Wong (1993), dalam Sandra dan Kusuma (2004) menemukan bahwa auditor yang berskala besar lebih dapat dipercaya, hal ini dibuktikan dengan *earnings respon coefficient* untuk perusahaan yang diaudit oleh auditor *big six* lebih besar dibandingkan dengan klien auditor *non big six*. Jan dan Lin (1993) dalam Sandra dan Kusuma (2004) juga menemukan bahwa pasar lebih menyukai kualitas jasa audit yang lebih besar (*big eight*) daripada *non big eight*.

Johnson, Khurana dan Reynolds (2002) menyatakan bahwa hasil audit KAP besar lebih berkualitas dengan alasan secara umum memiliki dua keunggulan, yaitu kompetensi dan independensi yang lebih tinggi dibandingkan KAP kecil. Kompetensi lebih tinggi karena KAP besar didukung oleh program dan fasilitas pelatihan bagi staffnya dengan lebih baik. Sedangkan independensi dalam pelaporan dianggap lebih tinggi karena KAP besar rata-rata memiliki klien besar serta dalam jumlah yang lebih banyak sehingga dimungkinkan KAP tersebut memiliki kekuatan finansial untuk terus berdiri. Singhvi dan Desai (1971, dalam Mardiyah 2001) menemukan ada hubungan yang cukup signifikan antara KAP dengan kualitas *disclosure*.

Lee et al. (1999) meneliti hubungan antara kualitas audit, pengungkapan informasi dan risiko perusahaan yang melakukan *Initial Public Offering* (IPO) di pasar modal Australia. Penelitian mereka menemukan bahwa pemilihan auditor berkualitas tinggi yang dibagi dalam *Big Eight* dan *Non Big Eight*, memiliki hubungan positif dengan resiko perusahaan saat IPO dan memiliki hubungan positif dengan keputusan untuk menyediakan informasi secara sukarela, khususnya informasi tentang *earnings* yang diharapkan. Reputasi auditor

berperan penting dalam mengungkapkan informasi yang memiliki kredibilitas tinggi sebagai sinyal yang efektif tentang nilai perusahaan.

Hasil penelitian ini dikatakan mendukung *signaling models* yang dikemukakan oleh Datar, Feltman dan Hughes (1991, dalam Lee et al. 1999). Mereka menyatakan bahwa biaya yang tidak dapat didiversifikasi dapat dikurangi dengan menggunakan KAP yang berkualitas tinggi, namun permintaan auditor berkualitas tinggi ini meningkatkan resiko yang dapat didiversifikasi perusahaan tersebut. Hal ini berlawanan dengan hasil Titman dan Trueman (1986, dalam Lee et al.,1999) dimana kualitas audit berhubungan negatif dengan tingkat resiko perusahaan.

Fitriany (2001) dalam penelitiannya tentang signifikansi perbedaan tingkat kelengkapan pengungkapan wajib dan sukarela pada laporan keuangan perusahaan publik yang terdaftar di BEI tahun 1999, menemukan KAP merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi indeks kelengkapan pengungkapan wajib. Perusahaan publik di Indonesia yang menggunakan KAP HTM (Hans Tuanakotta dan Mustofa) dan KAP Prasetyo Utomo diketahui mempunyai tingkat pengungkapan sukarela lebih tinggi dibandingkan KAP lainnya. KAP ternyata cukup signifikan dalam mempengaruhi luas pengungkapan atas laporan keuangan.

2.5. Kebangkrutan (*Financial Distress*)

Masalah keuangan yang dihadapi suatu perusahaan, apabila dibiarkan berlaru-larut dapat mengakibatkan terjadinya kebangkrutan (*financial distress/default risk*). *Financial distress* adalah konsep luas yang terdiri dari

beberapa situasi dimana suatu perusahaan menghadapi masalah kesulitan keuangan (Luciana 2004).

Plat dan Platt (2002, dalam Luciana, 2004) menyatakan kegunaan informasi jika suatu perusahaan mengalami *financial distress* adalah :

- Dapat mempercepat tindakan manajemen untuk mencegah masalah sebelum terjadinya kebangkrutan.
- Pihak manajemen dapat mengambil tindakan *merger* atau *take over* agar perusahaan lebih mampu untuk membayar hutang dan mengelola perusahaan dengan lebih baik.
- Memberikan tanda peringatan awal adanya kebangkrutan pada masa yang akan datang.

Model prediksi kebangkrutan dipelopori oleh pengujian *univariate Beaver* (1996) dan *analisis discriminant multivariate* Altman (1968), yang telah mengembangkan sistem *scoring* secara matematik yang memprediksikan kemungkinan kebangkrutan perusahaan-perusahaan dengan tingkat akurasi 70 persen selama dua tahun sebelum kebangkrutan terjadi dengan melihat rasio-rasio keuangan dari laporan yang dikeluarkan oleh perusahaan-perusahaan publik karena kebutuhan yang mendesak perusahaan untuk memprediksikan kebangkrutan dalam jangka waktu dekat sangat penting untuk investor maupun kreditor.

Secara detail persamaan Altman Z-score adalah sebagai berikut:

$$Z = 1,2 * (\text{Modal Kerja/Total Aset}) + 1,4 * (\text{Laba Ditahan/Total Aset}) + 3,3 * (\text{Laba Sebelum Pajak dan Beban Bunga (EBIT)/Total Aset}) + 0,6 * (\text{Nilai Pasar dari Ekuitas/Nilai buku dari Utang}) + 1,0 * (\text{Penjualan/Total Aset}).$$

Dimana :

1. $Z\text{-score} > 2,99$, berarti perusahaan yang tidak mempunyai permasalahan (*non-bankrupt company*).
2. $2,7 < Z\text{-score} < 2,99$, menunjukkan indikasi sedikit masalah (meskipun tidak serius).
3. $1,8 < Z\text{-score} < 2,69$, memberikan indikasi apabila perusahaan tidak melakukan perbaikan yang radikal, perusahaan mungkin akan mengalami ancaman kebangkrutan dalam jangka waktu dua tahun.
4. $Z\text{-score} < 1,8$, menunjukkan indikasi perusahaan mengalami ancaman kebangkrutan yang serius dan para investor dan kreditor seharusnya berhati-hati dalam melakukan investasi.

Adanya *financial distress* menyebabkan meningkatnya biaya modal karena adanya asimetri informasi antara manajer dan *stakeholder*. Reputasi manajer dapat tercoreng karena adanya *distress*, adanya resiko yang ditanggung *supplier* akibat kehilangan konsumen utama, pemberian pinjaman yang sering meningkatkan biaya pinjaman (*cost of borrowing*) demi mengantisipasi meningkatnya *default risk* (Khana dan poulsen 1995; Whitaker 1999 dalam Webb, 2003 hal 1). Adanya *reputation effect* dan *organization cost* menyebabkan manajer mengambil langkah lebih lanjut untuk memulihkan

distress dan respon dari *stakeholder* dengan menerbitkan pengungkapan sukarela.

Security Exchange Commission (SEC) juga menyarankan agar MD&A (*Management Discussion and Analysis*) perusahaan yang mengalami *financial distress* memberi gambaran yang lebih detail terhadap *stakeholders* khususnya tentang kondisi keuangan perusahaan dan hasil operasi serta memberikan perhatian khusus terhadap prospek perusahaan.

Untuk perusahaan yang mengalami *financial distress* (Trueman's 1986, dalam Webb, 2003) mengatakan bahwa manajer yang memiliki keahlian tinggi dapat mengenali perkembangan *distress* dan akan memberikan informasi ini sebagai usaha untuk meminimalisasikan kerugian sebagai efek dari *distress*, sebaliknya manajer yang memiliki keahlian rendah tidak melakukan hal tersebut suatu rencana strategik atau tidak melakukan pengungkapan secara kredibel.

Webb (2003) dalam penelitiannya menemukan bahwa perusahaan yang memiliki *high-skill manager* akan membuat pengungkapan yang lebih luas dan berkualitas dari pada perusahaan yang memiliki *low-skill manager*.